



DETERMINAN KEMISKINAN DI JAWA DAN SUMATERA, INDONESIA

Roosemarina Anggraini Rambe

***Abstract** The research objective is to analyze the role of government expenditure, the interaction between the previous government expenditure and poverty rate, economic growth, and local government location on poverty alleviation in Java and Sumatra, Indonesia. The analytical method used is multiple linear regression. The result shows that government expenditure and economic growth have a significant negative impact on the poverty rate. Conversely, the interaction of government expenditure and poverty rate in the previous year has a significant positive impact on the poverty rate of the current year. For the location variable, the poverty rate in Java is significantly lower than Sumatra. Therefore, it is recommended for the government to shift its focus to poverty, aside from their typical feeding program. Besides, the government is also advised to make appropriate regulations so that economic growth can be utilized better to alleviate the poverty rate.*

Keywords: dummy of location, economic growth; government expenditure; poverty rate; the interaction of previous expenditure and poverty rate

©2022 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi dan Jawa. Dari lima pulau besar tersebut, pulau dengan jumlah pemerintah daerah terbanyak adalah Sumatera, yang diikuti oleh Jawa. Namun demikian, dilihat dari pengeluaran pemerintah daerah yang dimiliki, ternyata total pengeluaran pemerintah terbesar berada di Jawa. Total pengeluaran pemerintah daerah di Sumatera lebih sedikit daripada pengeluaran pemerintah daerah di Jawa. Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk terbanyak berada di Jawa. Untuk itu diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar di Jawa untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan jumlah penduduk terbanyak. Pengeluaran pemerintah daerah ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah tingkat kemiskinan yang rendah. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Jawa dan Sumatera, maka pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan juga lebih besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan di dua wilayah tersebut. Bahkan pengeluaran pemerintah di tahun sebelumnya diyakini masih dapat menurunkan kemiskinan di tahun sekarang, misalnya pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk masyarakat menengah ke bawah.

Namun sayangnya tingkat kemiskinan di Jawa dan Sumatera masih lebih tinggi dari Kalimantan (6,17% di tahun 2017), padahal pengeluaran pemerintah daerah di Kalimantan lebih rendah dari Jawa dan Sumatera. Kondisi ini mengindikasikan kinerja

pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Jawa dan Sumatera belum efektif; ada indikasi pengeluaran pemerintah daerah tidak memiliki *pro-poor program*; program dan aktivitas pemerintah tidak mendukung pengentasan kemiskinan. Dengan keterbatasan dana negara Indonesia, seharusnya pemerintah daerah mampu membuat program dan menciptakan aktivitas yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan (*pro-poor program*) di pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih mendalam peran pengeluaran pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di pulau Jawa dan Sumatera.

Bahkan, pengeluaran pemerintah di tahun sebelumnya seharusnya juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan karena ada beberapa program dan kegiatan pemerintah daerah yang dampaknya tidak dapat dirasakan di tahun yang sama, misalnya pelatihan untuk masyarakat UKM, diperlukan waktu bagi pelaku UKM untuk mengadaptasi dan meningkatkan skill sehingga dampak peningkatan pada pendapatan UKM baru dapat dirasakan di tahun berikutnya, sehingga ada proses interaksi antara pengeluaran dengan penduduk miskin. Variable pengeluaran tahun lalu diinteraksikan dengan kemiskinan tahun lalu menjadi kontribusi penelitian ini untuk melihat pengaruhnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan tahun ini.

Tentu saja pengeluaran pemerintah bukan satu-satunya faktor yang berperan sebagai determinan kemiskinan. pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai syarat keharusan dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pertumbuhan ekonomi, PDB meningkat, dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah (Chen et al., 2016). Perekonomian di Jawa dan Sumatera terus tumbuh. Tapi, dikaitkan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di dua wilayah ini, hubungan keduanya tidak terlihat jelas. Walaupun perekonomian terus tumbuh, yang ditandai dengan PDRB terus meningkat, ternyata beberapa kabupaten/kota masih mengalami kemiskinan yang tinggi di dua wilayah ini. Untuk itu, perlu diteliti bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan.

Selain itu, secara umum, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa lebih rendah daripada Sumatera. Dengan demikian, ada indikasi lokasi menjadi determinan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, interaksi pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dengan kemiskinan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, dan *dummy* pulau terhadap kemiskinan di Jawa dan Sumatera.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan merupakan kondisi sosial dan ekonomi seseorang yang menyebabkan dia tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya (Subekan dan Hartoyo, 2012). Indikator kemiskinan yang umum digunakan adalah garis kemiskinan. Masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan akan dikelompokkan sebagai masyarakat miskin. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh garis kemiskinan, sehingga, semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Peran pengeluaran pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan telah banyak diteliti. Beberapa peneliti menemukan adanya pengaruh negatif pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan (Arham & Naue, 2015; Celikay &





Gumus, 2017; Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe, 2018; Madzinová, 2017; Sasana & Kusuma, 2018; Sasmal & Sasmal, 2016).

Proksi yang digunakan sebagai variabel pengeluaran pemerintah bervariasi. Sasana dan Kusuma (2018) dan Madzinová (2017) menggunakan total pengeluaran pemerintah sebagai proksi pengeluaran pemerintah. Sementara itu beberapa penelitian menyebutkan pengeluaran pada bidang tertentu seperti pengeluaran infrastruktur (Sasmal dan Sasmal, 2016), sosial (Celikay dan Gumus, 2017), dan pendidikan (Hidalgo-Hidalgo dan Iturbe-Ormaetxe, 2018). Sementara itu penelitian lain menggunakan pengeluaran beberapa bidang, seperti pengeluaran di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Arham dan Naue, 2015).

Dari penjelasan penelitian terdahulu tersebut, terlihat belum ada penelitian mengenai bagaimana variabel interaksi pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya (*time lag*) dengan kemiskinan tahun sebelumnya dapat mempengaruhi kemiskinan. Padahal variabel tersebut penting diteliti. Karena ada beberapa jenis pengeluaran yang digunakan namun tidak dapat menurunkan kemiskinan dalam tahun yang sama. Dalam penelitian ini, proksi pengeluaran yang digunakan adalah total pengeluaran pemerintah. Variabel pengeluaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan tahun sebelumnya (interaksi pengeluaran pemerintah *time lag t-1* dengan kemiskinan *time lag t-1*) juga menjadi variabel yang akan diteliti.

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh untuk menurunkan kemiskinan. Beberapa penelitian mengungkapkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Affandi & Astuti, 2014; Chen et al., 2016; Ebunoluwa & Yusuf, 2018; Ginting & Dewi, 2013; Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe, 2018; Jayadi & Bata, 2016; Moore & Donaldson, 2016; Perera & Lee, 2013; Sasmal & Sasmal, 2016).

Hasil penelitian lain menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berbentuk U (Chambers, et al., 2008). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan di awal pembangunan, tapi semakin besar pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan menambah kemiskinan yang ada. Namun demikian, dalam jangka panjang, Nyasha, Gwenthure, Odhiambo (2017) mengungkapkan adanya pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Proksi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian terdahulu bervariasi. ada penelitian yang menggunakan GDP sebagai proksi pertumbuhan ekonomi (Nakabashi, 2018). Proksi lain yang dipakai sebagai pertumbuhan ekonomi adalah PDRB per kapita (Sasana dan Kusuma, 2018), PDRB per sektor (Jayadi dan Bata, 2016). Ada juga penelitian yang menggunakan proksi GDP per capita (Affandi dan Astuti, 2013; Hidalgo-Hidalgo dan Iturbe-Ormaetxe, 2018), GDP riil per kapita (Chambers et al., 2008; Nyasha et al., 2017), net domestic product per capita (Sasmal dan Sasmal, 2016). Dari penjelasan tersebut, maka PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi diterapkan dalam penelitian ini.

Posisi lokasi pulau, yaitu pulau Jawa dan pulau Sumatera, diyakini memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Walaupun belum ada penelitian terdahulu, hal ini dinilai penting untuk diteliti karena fakta menunjukkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di pulau Jawa lebih rendah daripada tingkat kemiskinan di pulau Sumatera. Variabel ini juga menjadi novelty penelitian ini selain variabel interaksi pengeluaran dengan kemiskinan tahun sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya.



Hipotesis penelitian:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
2. Interaksi pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya (*time lag t-1*) dengan kemiskinan tahun sebelumnya (*time lag t-1*) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
4. Lokasi pulau (*Dummy variable*) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

METODOLOGI

Desain penelitian ini adalah explanatory research. Penelitian ini akan mengkaji peran pengeluaran pemerintah, variabel interaksi antara pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dengan tingkat kemiskinan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, dan variabel dummy lokasi kabupaten/kota (Jawa) terhadap tingkat kemiskinan di Jawa dan Sumatera, Indonesia tahun 2018. Khusus untuk variabel interaksi akan digunakan data tahun sebelumnya (tenggat waktu dengan t-1). Jumlah kabupaten dan kota di kedua pulau ini adalah 268. Sumber data adalah BPK dan BPS, Indonesia.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini digunakan metode regresi linier berganda. Model penelitian adalah sebagai berikut:

$$TK = \alpha - \beta_1 \ln PP - \beta_2 \ln PP_{t-1} * TK_{t-1} - \beta_3 \ln PE - \beta_4 D + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan: TK adalah tingkat kemiskinan tahun 2019, TK_{t-1} adalah tingkat kemiskinan tahun sebelumnya (2018), PP adalah pengeluaran pemerintah tahun 2019, PP_{t-1} adalah pengeluaran pemerintah tahun 2018, PE adalah pertumbuhan ekonomi (dengan proksi PDRB) tahun 2019, D adalah variabel dummy dari lokasi kabupaten/kota; yaitu D = 1 untuk pulau Jawa; D = 0 untuk pulau lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Sumatera, 10 provinsi terdiri dari 154 kabupaten dan kota. Di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi dengan 114 kabupaten dan kota. Total data penelitian adalah 268 kabupaten dan kota. Variabel digambarkan dengan nilai rata-rata provinsi untuk setiap pulau.

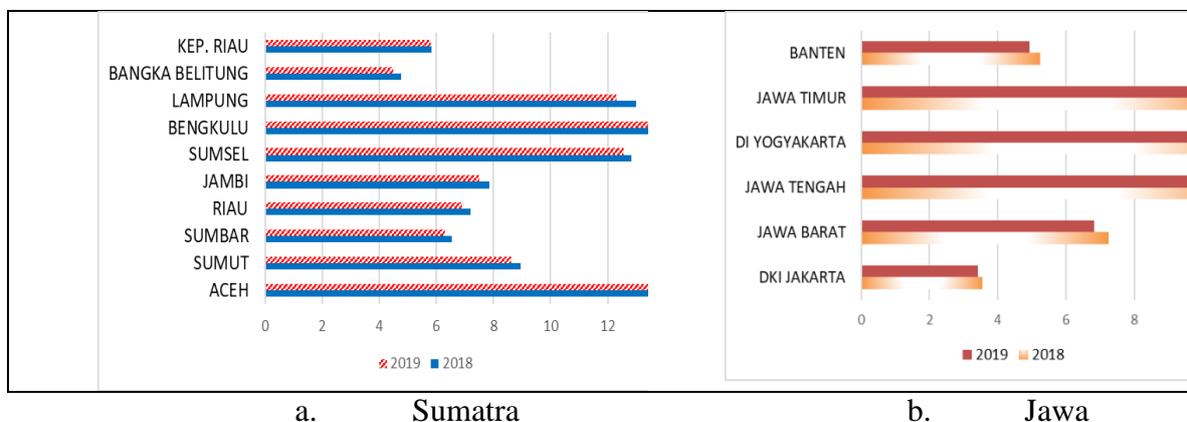
Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan tahun 2019 dan 2018 di Jawa dan Sumatera dijelaskan pada Diagram 1a dan 1b. Di Sumatera, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ada di Bangka Belitung. Sebaliknya, provinsi termiskin adalah NAD. Rata-rata kemiskinan di Sumatera tahun 2019 adalah 9,44%. Sementara itu, di Pulau Jawa, rata-rata angka kemiskinan provinsi tertinggi di Provinsi Yogyakarta, dengan terendah di Jakarta. Kabupaten/kota di semua provinsi di Jawa berhasil menurunkan angka kemiskinan. Secara rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa lebih rendah daripada Sumatera yaitu 7,9%.





Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Rata-rata Kabupaten/kota Setiap Provinsi di Jawa dan Sumatera 2018 dan 2019



Sumber: BPS. Data diolah

Dengan membandingkan Gambar 1a dan 1b, dapat dikatakan bahwa rata-rata angka kemiskinan di Jawa lebih rendah daripada di Sumatera. Bahkan keberhasilan provinsi-provinsi di Jawa dalam mengurangi kemiskinan juga lebih baik daripada di Sumatera. Rata-rata angka kemiskinan di Jawa mengalami penurunan sebesar 0,41% pada tahun 2019, dibandingkan dengan Sumatera yang hanya turun sebesar 0,36%.

Pengeluaran pemerintah

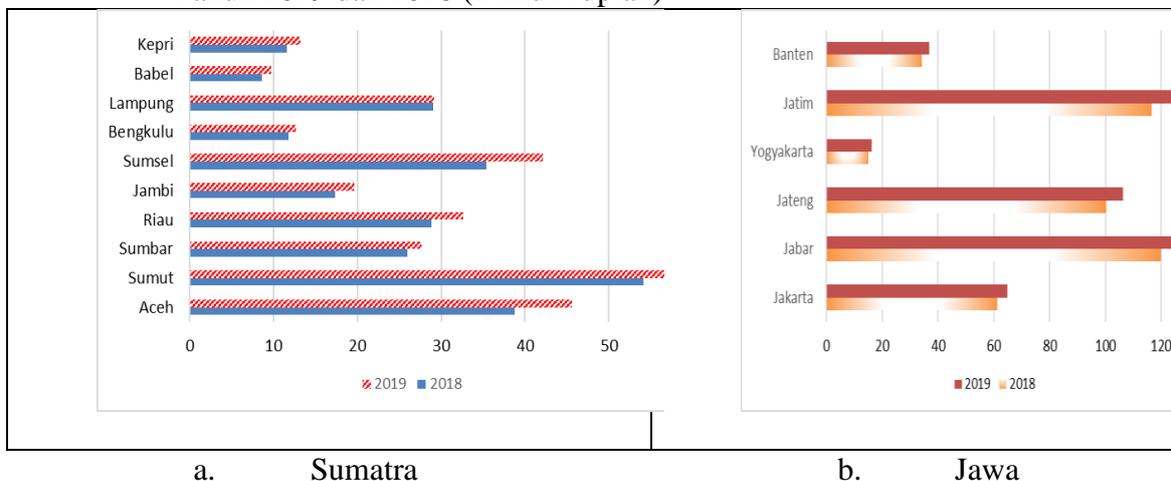
Dalam mendeskripsikan data pengeluaran pemerintah di satu provinsi, studi ini merangkum pengeluaran pemerintah dari semua pemerintah daerah di satu provinsi. Misalnya, untuk Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota, pengeluaran pemerintah di Bengkulu merupakan penjumlahan pengeluaran dari 10 pemerintah daerah di Bengkulu. Informasi total pengeluaran pemerintah daerah dalam satu provinsi ditunjukkan pada Gambar 2a (Sumatera) dan 2b (Jawa).

Di Sumatera, provinsi dengan pengeluaran pemerintah terendah adalah Bangka Belitung, yang terdiri dari 7 kabupaten dan kota. sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran pemerintah tertinggi adalah Sumatera Utara yang terdiri dari 32 kabupaten dan kota.

Di Jawa, Provinsi Yogyakarta memiliki pengeluaran pemerintah yang paling rendah. Hal ini dikarenakan Yogyakarta hanya memiliki 5 kabupaten dan kota. Sebaliknya, provinsi dengan kabupaten dan kota terbesar, seperti Jawa Timur, memiliki total pengeluaran pemerintah yang sangat besar. Meski Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pemerintahan terbanyak, ternyata total pengeluaran terbesar di Jawa ada di Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi. Dengan membandingkan Gambar 2a dan 2b, terlihat bahwa rata-rata pengeluaran provinsi di Jawa lebih besar dari Sumatera; Bahkan rata-rata pengeluaran di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan di Sumatera, baik pada tahun 2018 maupun 2019.



Gambar 2. Total Pengeluaran Pemerintah Daerah setiap Provinsi di Jawa dan Sumatera Tahun 2019 dan 2018 (Triliun rupiah)

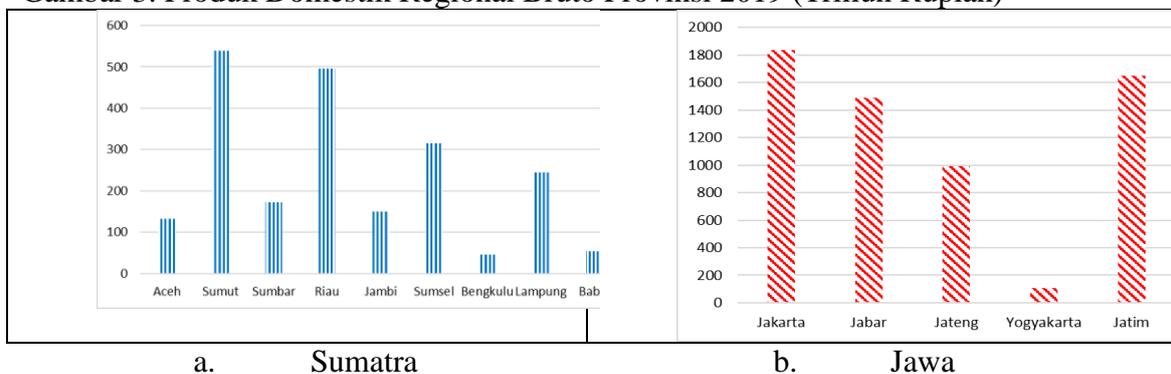


Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data diolah

Pertumbuhan Ekonomi

Variabel bebas berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan proksi PDRB, yang dijelaskan pada Gambar 3a dan 3b. Di Sumatera, PDRB tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan PDRB terendah dimiliki oleh Provinsi Bengkulu (Gambar 3a). Sementara itu, di Jawa PDRB tertinggi terdapat di DKI Jakarta, sedangkan PDRB terendah berada di Provinsi DIY (Gambar 3b).

Gambar 3. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi 2019 (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS. Data diolah

Dengan membandingkan dua pulau pada Gambar 3a dan 3b, diketahui bahwa PDRB provinsi di Jawa jauh lebih tinggi daripada di Sumatera. Bahkan, PDRB provinsi di Jawa 4x lipat PDRB provinsi di Sumatera. Informasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa jauh lebih cepat daripada di Sumatera.

Setelah mendeskripsikan deskripsi data penelitian, selanjutnya akan dijelaskan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis penelitian (Tabel 1), dilanjutkan dengan penjelasan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.





Tabel 1. Model Regresi

	C	Ln PP	lnPP _{t-1} *TK _{t-1}	Ln PDRB	Dummy lokasi
Koefisien	10.52748	-0,322105	0,073798	-0,092307	-0,154083
T statistik	6.38070	-5.573080	200.7330	-1.83022	-2.312241
Signifikansi	***	***	***	**	**
R ²	0,993677				
F Statistik	10332.91				
Probabilitas	0,0000				

Catatan: ***, **, * menunjukkan tingkat signifikan pada $\alpha = 1\%$, 5%, 10%.

Sumber: Hasil penelitian

Pengujian asumsi klasik dilakukan, dan dapat dikatakan bahwa asumsi klasik tidak dilanggar. Dengan demikian, dilanjutkan pengujian hipotesis. Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji F, yaitu untuk menguji keseluruhan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan. Uji F dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa H₀ ditolak pada = 5%. Ini berarti semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan. Demikian pula koefisien determinan sebesar 0,9936 memperkuat besarnya kemampuan (99,36%) keempat variabel bebas dalam menjelaskan variasi angka kemiskinan di Jawa dan Sumatera.

Bagian selanjutnya adalah mendeskripsikan pengujian secara parsial untuk pengaruh variabel independen. Tabel 1 juga menyajikan informasi uji parsial dengan uji-t. Pada tabel tersebut, pada uji parsial, H₀ ditolak untuk variabel pengeluaran pemerintah yang artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada = 5%. H₀ juga ditolak untuk variabel PDRB pada = 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Demikian juga H₀ ditolak untuk variabel dummy lokasi pemerintah daerah (Jawa) Artinya tingkat kemiskinan di Jawa lebih rendah dibandingkan di Sumatera.

Berbeda dengan ketiga variabel bebas yang dijelaskan sebelumnya, H₀ ditolak untuk variabel interaksi antara pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dan tingkat kemiskinan tahun sebelumnya, tetapi dengan arah pengaruh yang berlawanan. Variabel interaksi antara pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dengan tingkat kemiskinan tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin besar pengeluaran pemerintah terkait dengan tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya, semakin besar tingkat kemiskinan saat ini.

Setelah dilakukan uji F dan uji t yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, kecuali variabel interaksi yang meningkatkan angka kemiskinan, maka variabel bebas dievaluasi untuk menentukan variabel mana yang paling signifikan. berdampak pada angka kemiskinan. Berdasarkan koefisien regresi masing-masing variabel, terlihat bahwa variabel dengan koefisien terbesar adalah pengeluaran pemerintah, disusul dengan variabel dummy Jawa.

Sebaliknya, variabel interaksi paling kecil pengaruhnya terhadap peningkatan angka kemiskinan.

PEMBAHASAN

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif pada kemiskinan. Hasil penelitian ini parallel dengan penelitian terdahulu (Affandi & Astuti, 2014; Celikay & Gumus, 2017; Chambers et al., 2008; Fan & Zhang, 2012; Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe, 2018; Madzinová, 2017; Sasmal & Sasmal, 2016). Semakin besar pengeluaran pemerintah, semakin besar kemungkinan angka kemiskinan di Jawa dan Sumatera dapat ditekan. Dari keempat variabel bebas tersebut, pengeluaran pemerintah paling berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan koefisien regresi sebesar 0,32, peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,32%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Jawa dan Sumatera telah berhasil menyelenggarakan program dan kegiatan untuk masyarakat miskin karena banyaknya penduduk miskin di daerah mengalami penurunan pada tahun tersebut. Beberapa program dan kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin di Indonesia, termasuk Jawa dan Sumatera, adalah program pemberdayaan UKM, program bantuan sosial berbasis keluarga, serta program pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Tentang variabel interaksi antara pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dan kemiskinan tahun sebelumnya yang berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan, dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah belum berhasil mengentaskan kemiskinan. Program pro-poor di Jawa dan Sumatera masih terfokus pada program bansos berbasis keluarga, khususnya program pemberian makanan (seperti bantuan beras untuk fakir miskin dan bantuan pangan nontunai) yang dijalankan di seluruh wilayah di Indonesia. Program-program ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan pada tahun itu.

Meski demikian, pengeluaran pemerintah (khususnya program pemberian makan) tidak dapat menurunkan angka kemiskinan untuk tahun berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi negatif dari variabel interaksi antara pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dengan tingkat kemiskinan tahun sebelumnya. Pengeluaran pemerintah, terutama program pemberian makanan, ternyata menimbulkan kemalasan dan penurunan produktivitas pada orang miskin. Sedangkan koefisien regresi variabel interaksi (0,034) merupakan yang terkecil dari keempat variabel bebas, variabel interaksi masih akan meningkatkan angka kemiskinan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mulai fokus mengembangkan program-program pro-poor lainnya seperti program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UKM, sehingga penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Variabel selanjutnya adalah PDRB. PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang ada, yang menyatakan bahwa jika ekonomi tumbuh maka pendapatan masyarakat akan meningkat, sehingga kemiskinan akan berkurang. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Affandi & Astuti, 2014; Chambers et al., 2008; Ginting & Dewi, 2013; Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe, 2018; Jayadi & Bata, 2016; Perera & Lee, 2013; Sasmal & Sasmal, 2016).

PDRB meningkat sebesar 1% dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,092%. Kemampuan pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan dari adanya peningkatan PDRB, untuk mengurangi kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan





kemampuan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan perekonomian di Jawa dan Sumatera tidak banyak bersentuhan dengan masyarakat kecil, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh usaha non padat karya. Dengan demikian, dengan pertumbuhan ekonomi 1% yang hanya sedikit bersentuhan dengan kelas menengah ke bawah, tidak banyak yang terselamatkan dari kemiskinan, karena jumlahnya hanya 0,092%. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan, dimana orang yang bermodal akan semakin kaya, tetapi yang miskin akan tetap miskin.

Variabel terakhir yang dianalisis adalah variabel dummy lokasi pemerintah daerah (Jawa). Nilai dummy = 1 untuk Jawa, sedangkan dummy = 0 untuk sebaliknya (Sumatera). Variabel dummy ini berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan koefisien regresi variabel dummy sebesar -0,154 dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Jawa rata-rata lebih rendah 0,154% dibandingkan angka kemiskinan di Sumatera. Persentase yang lebih rendah dari rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa adalah wajar karena kabupaten dan kota di Jawa lebih maju daripada di Sumatera. Infrastruktur, pusat pemerintahan, industri, dan pusat bisnis di Jawa telah menjadi mercusuar bagi para pekerja terampil untuk berkumpul dan bekerja di Jawa. Perekonomian yang lebih maju menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini belum terjadi di Sumatera. Oleh karena itu, wajar saja jika angka kemiskinan di Jawa lebih rendah dari Sumatera.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemiskinan. Namun, penentuan program yang tepat dilakukan oleh pemerintah akan memperkuat dampak pengeluaran pemerintah di masa depan, yang ditunjukkan oleh variabel interaksi antara pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya dan tingkat kemiskinan tahun sebelumnya dalam penelitian ini. Jika pemerintah fokus pada program pemberian makan, maka tingkat kemiskinan akan turun untuk sementara, namun kemiskinan tersebut meningkat pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk bijak dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintahnya agar berhasil mengentaskan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Hal yang sama berlaku untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus bisa membuat regulasi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat tanpa menimbulkan kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak positif tidak hanya bagi si kaya tetapi juga si miskin sehingga angka kemiskinan dapat dientaskan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., & Astuti, D. P. (2014). Dynamic model of Ibn Khaldun theory on poverty: Empirical analysis on poverty in majority and minority Muslim populations after the financial crisis. *Humanomics*, 30(2), 136–161. <https://doi.org/10.1108/H-05-2012-0010>
- Arham, M. ., & Naue, T. . (2015). Public Expenditures and Poverty: Evaluation of the Government: Priority Programs in Gorontalo Province. *Economic Journal of*



- Emerging Markets*, 7(2), 1070119.
- Celikay, F., & Gumus, E. (2017). The effect of social spending on reducing poverty. *International Journal of Social Economics*, 44(5), 620–632. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2015-0274>
- Chambers, D., Wu, Y., & Yao, H. (2008). The impact of past growth on poverty in Chinese provinces. *Journal of Asian Economics*, 19(4), 348–357. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2008.04.004>
- Chen, J., Wang, Y., Wen, J., Fang, F., & Song, M. (2016). The influences of aging population and economic growth on Chinese rural poverty. *Journal of Rural Studies*, 47, 665–676. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.11.002>
- Ebunoluwa, Oyegoke O., and Yusuf, Wasiu A. (2018). Effects of Economic Growth on Poverty Reduction In Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance* 9 (5), 25-29. www.iosrjournals.org
- Fan, S., & Zhang, X. (2012). Public expenditure, growth, and poverty reduction in rural Uganda. *Public Expenditures for Agricultural and Rural Development in Africa*, 178–201. <https://doi.org/10.4324/9780203124529>
- Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 117–130.
- Hidalgo-Hidalgo, M., & Iturbe-Ormaetxe, I. (2018). Long-run effects of public expenditure on poverty. *Journal of Economic Inequality*, 16(1). <https://doi.org/10.1007/s10888-017-9360-z>
- Jayadi, D. ., & Bata, A. (2016). Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2012. *Modus*, 28(1), 87099.
- Madzinová, R. (2017). Impact of Government Spending on Income Inequality. *The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences*, XXVI(2), 1–9.
- Moore, Joel D., Donaldson, John A. (2016). .Human-Scale Economics: Economic Growth and Poverty Reduction in Northeastern Thailand. *World Development*. 85, 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.04.004>
- Nakabashi, L. (2018). Poverty and economic development: Evidence for the Brazilian states. *Economia*, 19(3), 445–458. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.11.002>
- Nyasha, S., Gwenthure, Y., & Odhiambo, N. M. (2017). Poverty and Economic Growth in Ethiopia: A Multivariate Causal Linkage. *The Journal of Developing Areas*, 51(1), 343–359. <https://doi.org/10.1353/jda.2017.0019>
- Perera, L. D. H., & Lee, G. H. Y. (2013). Have economic growth and institutional quality contributed to poverty and inequality reduction in Asia? *Journal of Asian Economics*, 27, 71–86. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.06.002>
- Sasana, H., & Kusuma, P. (2018). Government Expenditure and Poverty in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(10), 142. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3125>
- Sasmal, R., & Sasmal, J. (2016). Public Expenditure, Economic Growth and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 604–618. <http://doi.org/10.1108/IJSE-08-2014-0161>

